

3

by 3 3

Submission date: 02-May-2023 07:01AM (UTC+0200)

Submission ID: 2081760433

File name: 38-Article_Text-145-1-10-20221022.pdf (230.86K)

Word count: 4685

Character count: 29536

ATURAN POLIGAMI DI INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA MUSLIM

Sunadi Rudin¹⁾, Yasni Efyanti²⁾

Institut Agama Islam Negeri Kerinci

sunadirudin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai aturan poligami di Indonesia dan negara-negara Muslim. penelitian kualitatif yang mengambil bentuk penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, hukum poligami di Indonesia tertera dalam hukum perkawinan UU Nomor 1 Tahun 1978, dan dalam kodifikasi Hukum Keluarga Islam. Sebagaimana di Indonesia, di negara-negara muslim pun juga mempunyai aturan poligaminya masing-masing, yang kesemuanya bersumber dari al-Quran dan hadis sebagai sumber dasar hukum Islam.

Kata kunci: Negara Muslim, Poligami.

1. PENDAHULUAN

Sebagian dari masyarakat kita kurang atau tidak setuju dengan poligami dan mereka menentang praktik poligami yang ada sekarang ini, karena efek negatifnya sangat besar bagi keluarga dan banyak menyakiti kaum perempuan. Namun, sebagian yang lain menyetujui poligami dengan alasan-alasan tertentu. Kelompok terakhir ini beralasan bahwa meskipun poligami memiliki banyak resiko, tetapi bukanlah sesuatu yang dilarang oleh agama, khususnya Islam. Beberapa waktu yang lalu masyarakat kita dikejutkan dengan adanya pemberian "Poligami Award" oleh Puspo Wardoyo, salah seorang poligam yang juga pengusaha, kepada sekitar 40-an orang yang melakukan poligami. Tidak tanggung-tanggung, acara itu dilaksanakan di sebuah hotel berbintang di Jakarta dan dihadiri sejumlah orang terkenal, termasuk Ebet Kadarusman, Ratih Sanggarwati, Neno Warisman, serta Astri Ivo. Acara ini memang tidak berjalan lancar, karena menuai banyak protes dari sebagian orang yang menentang poligami (Pikiran Rakyat, 2 Agustus 2003). Fenomena semacam ini sebelumnya belum pernah terjadi di tengah-tengah masyarakat kita yang sebenarnya sudah banyak yang mempraktikkan poligami.

Perkawinan merupakan satu hal yang bersifat qodrati. Kebutuhan akan teman intim, penyaluran hasrat biologis hingga keinginan untuk memiliki keturunan, merupakan faktor pendorong lahirnya perkawinan. Lebih jauh, Al- Qur'an menggariskan adanya perkawinan sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dalam wujud ketentraman jiwa dan kasih sayang.¹ Semua keinginan mulia ini dapat terwujud melalui adanya perkawinan. Oleh karena itu, di sisi lain, al-Qur'an menyebut ikatan perkawinan sebagai satu ikatan yang kokoh

¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid VII, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 483.

dan agung (*misaqan Galida*)², dan masing-masing pribadi yang terikat dalam bingkai perkawinan wajib menjaganya dengan sungguh-sungguh sehingga tercapai tujuan hakiki dari perkawinan.

Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dua sumber pokok ajaran Islam, juga menyediakan dalil yang lengkap mengenai hukum perkawinan. Dalil-dalil tersebut lantas dielaborasi sedemikian rupa oleh para mujtahid hingga menghasilkan fikih dalam bidang perkawinan yang dikenal sebagai fikih munakahat. Fikih munakahat, dengan demikian, merupakan bidang fikih yang menguraikan persoalan nikah, talak, rujuk, dan pengasuhan anak. Dalam persoalan nikah, tertuang banyak ketentuan termasuk diantaranya berkaitan dengan poligami.

Pembahasan poligami kerap memunculkan perdebatan. Pasalnya, dalam sumber pokok ajaran Islam, poligami hadir dalam bingkai teks hukum yang tidak seragam. Penafsiran dan pemahaman terhadap sumber-sumber teks tersebut pada gilirannya juga beragam. Terlebih lagi, kondisi masyarakat kekinian yang sudah mengalami pergeseran dalam banyak hal, menjadi pemicu lahirnya keinginan untuk 'membaca ulang' ketentuan mengenai poligami. Isu kesetaraan dan keadilan juga turut memantik perdebatan tentang poligami, baik pada ranah fikih maupun Undang-undang Negara. Sebagai contoh, poligami yang dalam wacana klasik dimaknai sebagai 'hak' laki-laki dalam menambah jumlah istri, tanpa ada syarat yang bersifat pasti dan mengikat, kini dimunculkan dengan aturan yang lebih pasti, terukur, dan memiliki daya ikat hukum. Tujuannya tentu dalam rangka lebih menghargai posisi dan peran perempuan dalam konteks perkawinan.

Kajian ini mengulas aturan poligami yang tertuang dalam dinamika perundang-undangan, dengan melihat fakta dan latar sejarah serta tujuan yang hendak dicapai. Konteks perundang-undangan yang dimaksud adalah undang-undang Indonesia dan membandingkannya dengan undang-undang Negara muslim lainnya. Sebagai landasan kajian, Pembahasan dimaksud diawali dengan menghadirkan perbincangan tentang poligami dalam kajian fikih.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dekskriptif dalam bentuk studi kepustakaan (library research). Penelitian dalam bentuk studi kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mengolah mengenai ketentuan poligami di Indonesia dan negara muslim lainnya, dengan menggunakan berbagai sumber literatur yang sesuai dengan tema penelitian yang diambil. Sumber bahan pustaka tidak hanya terbatas pada buku cetak, namun juga sumber non cetak seperti jurnal ilmiah, e-book, media online serta sumber literatur lainnya.

² Lihat, QS. An-Nisa' ayat 21

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. ATURAN POLIGAMI DALAM KONTEKS INDONESIA

Secara umum, wacana tentang masuknya ajaran Islam secara formal ke dalam ‘wilayah’ negara telah mengemuka sejak lahirnya negeri ini. Awal pembentukan negara yang diwarnai tarik ulur kepentingan mengenai bentuk dan dasar negara menunjukkan adanya upaya-upaya formalisasi Islam dalam ranah negara. Jika kemudian pilihan jatuh kepada bentuk Negara Pancasila, hal ini tidaklah berarti memadamkan semangat kelompok formalisme agama. Mereka terus berjuang dengan caranya, terutama pasca Reformasi. Namun demikian, kelahiran UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI tidak berarti merupakan upaya formalisme sebagaimana tuntutan kelompok fundamentalis. Hal ini karena dalam beberapa hal terdapat perbedaan fundamental antara kelahiran aturan normatif ini, dengan tuntutan dan mindset mereka.³

Berkait dengan adanya hukum mengenai perkawinan dan secara umum tentang keluarga, telah mengemuka sejak lama. Secara kultur, muncul beberapa tokoh khususnya dari kalangan wanita yang menyuarakan kritik terhadap aturan perkawinan yang dalam banyak sisi cenderung deskriminatif. Tersebut nama RA Kartini dari Jawa Tengah dan Rohana Kudus dari Minangkabau, yang mengemukakan kritik tentang munculnya keburukan-keburukan akibat dari praktik perkawinan paksa, di bawah umur, pola perceraian yang sewenang-wenang, dan juga poligami.⁴

Pada persoalan yang lebih khusus, yaitu tentang poligami, terdapat pertemuan kalangan wanita yang tergabung dalam organisasi *Puteri Indonesia*, bekerjasama dengan *Persaudaraan Isteri*, *Persatuan Isteri* dan *Wanita Sejati*, pada tanggal 13 Oktober 1929 yang menghasilkan ketetapan mengenai larangan poligami. Hasil ketetapan ini dibicarakan bersama dengan tema yang lain, yaitu mengenai pelacuran. Selanjutnya, pada bulan Juni 1931, dilaksanakan pula Kongres *Isteri Sedar* yang menghasilkan keputusan menguatkan larangan poligami. Rentetan perjuangan kelembagaan ini, pada gilirannya memberikan dorongan kepada pemerintah Hindia Belanda waktu itu untuk merumuskan Rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat dengan mengakomodir ‘seruan’ kaum wanita tersebut.

³ Baca, M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1998), cet. ke-2, h. 3-7; Marzuki Wahid dan Nurrohman, *Dimensi Fundamentalisme dalam Politik Formalisasi Syari’at Islam, Kasus NAD*, dalam *Taswirul Afkar*, Edisi No. 13 Tahun 2002, h. 34-37; Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), cet. ke-5, h. 2-4.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdemia&Tazafa, 2013), hlm. 27-28.

Salah satu yang kemudian muncul adalah adanya prinsip mongami dalam perkawinan, dan larangan menjatuhkan talak di luar pengadilan.⁵

Masa Orde Lama sebagai awal pemerintahan Indonesia, meski tidak banyak, juga memberikan respon akan pentingnya UU tentang perkawinan. Secara resmi pemerintah Indonesia merintis lahirnya UU tentang perkawinan dengan membentuk sebuah Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk dengan dasar keluarnya surat Menteri Agama No. B/2/4299, tertanggal 1 Oktober 1950.⁶

Dalam perjalanannya, Panitia ini melakukan kajian dalam rangka meninjau seluruh aturan tentang Perkawinan yang pernah ada, dan berhasil membuat rancangan Undang-undang yang dinilai lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, seiring gejolak politik yang terjadi, RUU ini tak berhasil disahkan karena lembaga legislatif yang seyogyannya mengesahkannya, dibekukan lewat Dekrit Presiden tahun 1959. Namun demikian, masih terdapat upaya-upaya untuk terus mengawal lahirnya UU Perkawinan, lewat beberapa pertemuan penting yang membicarakan masalah hukum perkawinan dan perundang-udangannya.⁷

Pada masa Orde Baru, upaya untuk melembagakan aturan tentang perkawinan dalam bentuk undang-undang Perkawinan terus dilaksanakan. Pada TAP MPRS No. XXVIII/MPRS/1966, tersebut ayat I pasal (3) yang mentakan bahwa perlu segera diadakan undang-undang tentang Perkawinan. Semangat dari TAP MPRS tersebut, maka secara faktual pada tahun 1967 dan 1968, pemerintah mengajukan dua rancangan undang-undang berkaitan dengan Perkawinan kepada DPR-GR, yaitu RUU tentang pernikahan umat Islam, dan RUU tentang ketentuan Pokok Perkawinan. Namun, kedua RUU tersebut tidak mendapat persetujuan dari lembaga Legislatif, oleh karena ada fraksi yang menolak RUU tersebut.

Sementara itu, desakan akan lahirnya UU Perkawinan semakin menguat. Ini dilakukan oleh lembaga dan organisasi-organisasi wanita yang tetap menginginkan lahirnya undang-undang tentang Perkawinan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum di bidang Perkawinan. Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) misalnya, dalam satu simposium di tanggal 29 Januari 1972 memberikan catatan penting bahwa makin dirasakan

⁵ *Ibid.*, 29

⁶ Pada masa ini lahir UU NO. 22 tahun 1946 yang pemberlakuannya diperluas lewat UU No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. *Ibid.*, hlm. 31

⁷ Pertemuan-pertemuan dimaksud adalah: (1). Musyawarah Nasional Kesejahteraan Keluarga tahun 1960; (2) Konferensi Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) Pusat yang diselenggarakan oleh Departemen Agama tahun 1962; (3) Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) bersama Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi) tahun 1963. *Ibid.*, hlm. 37.

mendesaknya akan keperluan sesuatu UU Perkawinan untuk Indonesia. Badan Musyawarah Organisasi-organisasi Wanita Indonesia juga mendesak pemerintah agar mengajukan kembali dua RUU yang pernah tidak disetujui oleh DPR-GR kepada DPR hasil pemilu 1971.⁸

Atas dorongan dari berbagai pihak, akhirnya setelah berupaya keras, pemerintah dapat menyiapkan sebuah RUU baru. RUU ini selanjutnya diajukan kepada DPR untuk dibahas dan disahkan pada tanggal 31 Juli 1973. RUU yang baru ini mempunyai 15 bab dan 73 pasal. Pembahasan mengenai RUU ini diwarnai dengan perdebatan, kontroversi dan adu argumentasi yang sengit. Masing-masing fraksi memberikan gambaran dan pandangan yang beragam. Ada kesepakatan, tarik ulur pendapat, hingga revisi-revisi. Di luar gedung parlemen, tak kalah panas. Banyak massa yang melakukan demonstrasi menentang bahkan mengutuk pembahasan mengenai RUU tersebut, dan menganggapnya sebagai upaya sekulerisasi. Pada akhirnya, RUU tentang hukum Perkawinan tersebut, setelah melalui proses yang demikian panjang, berhasil disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974. Meski demikian, pemberlakuannya secara efektif baru dimulai pada 1 Oktober 1975.⁹

B. POLIGAMI DALAM UU NO. 1/1974 DAN KHI

Pada dasarnya, asas perkawinan Islam sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah monogami/monogini, yaitu seorang suami hanya memiliki seorang istri, demikian pula sebaliknya. Dalam UU No.1/ 1974 dinyatakan: “Pada dasarnya, dalam suatu perkawinan seorang pria hanyaboleh mempunyai satu istri. Seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami”.¹⁰ Namun demikian, ini tidak berarti menutup kemungkinan bagi seorang suami untuk memiliki lebih dari seorang istri. Kemungkinan berpoligami tetap ada, dengan syarat poligami yang dilakukan didasarkan atas izin dari Pengadilan, dimana salah satu syaratnya adalah mendapat persetujuan dari istrinya. Dengan demikian, poligami bukanlah sebuah anjuran, namun juga bukan sebuah larangan. Poligami adalah sebuah kebolehan, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan syarat- syaratnya sebagaimana tertuang dalam UU Perkawinan. Hal kebolehan poligami ini, sejalan dengan pendapat Ulama fikih sebagaimana telah diuraikan.

Selanjutnya, kebolehan akan poligami juga dibatasi dengan jumlah istri maksimal empat (4) orang dalam satu ikatan perkawinan. Dalam hal ini, KHI menyatakan: “Beristri lebih

⁸ Khoiruddin Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 39

⁹ Hal demikian karena diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk pelaksanaan dari berbagai Instansi/ Departemen terkait, khususnya Departemen Agama, Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri. *Ibid.*, hlm. 51.

¹⁰ Lihat UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (1).

dari satu orang, pada waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri".¹¹

Pada prakteknya, jika seorang suami hendak melakukan poligami, maka ia harus mendapatkan izin dari pengadilan di tempat ia tinggal. Selanjutnya, pengadilan akan melihat dan menilai apakah pengajuan poligami dapat dikabulkan atau tidak. Secara normatif, pemberian izin poligami didasarkan atas pertimbangan kondisi istri yang mengalami kondisi-kondisi berikut:¹²

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Di samping kondisi di atas, seorang suami boleh mengajukan permohonan poligami apabila memenuhi syarat sebagai berikut:¹³

- a. Ada persetujuan dari istri/ istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri- istri dan anak-anaka mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak- anak mereka.

Ketentuan dalam UU Perkawinan ini memberikan penegasan dankepastian akan jaminan banyak hal, yang mencakup kemampuan fisik, dan finansial, baik untuk istri maupun anak-anaknya. Kepastian akan kemampuan sang suami juga harus ditopang dengan kondisi psikisnya yang mapan, sehingga mampu berlaku adil terhadap semua istri-istri dan anak-anaknya.

C. ATURAN POLIGAMI DI BEBERAPA NEGARA MUSLIM MODERN

Persoalan aturan tentang poligami, ternyata juga menyeruak di hampir semua Negara Muslim Modern. Meski dengan latar sejarah yang tidak persis sama, namun adanya tuntutan lesgislasi dalam hal poligami mengerucut kepada upaya menciptakan kepastian hukum yang dilatarbelakangi oleh tuntutan pengakuan akan harkat dan martabat kaum wanita.

Beberapa negara Muslim yang merupakan tetangga Indonesia, yakni di kawasan Asia Tenggara juga telah memiliki dan menerapkan aturan tentang poligami. Malaysia dalam UU Perkawinan-nya tidak secara tegas menyebutkan asas perkawinannya sebagai monogami. Hal ini memberikan ruang pemahaman bahwa perkawinan poligami adalah boleh. Hanya saja, secara normatif, Malaysia mengharuskan pencatatan secara administratif terhadap semua hal berkaitan dengan perkawinan, termasuk kaitan poligami. Perkawinan poligami akan diizinkan dengan melihat aspek-aspek yang berkait dengan

¹¹ Lihat, KHI Pasal 55 (ayat) 1.

¹² UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 (ayat) 2.

¹³ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 (ayat) 1.

suami dan istri. Hal-hal yang terkait dengan istri adalah: (i) kemandulan, (ii) uzur jasmani, (iii) secara jasmani tidak layak untuk bersetubuh, (iv) tidak mau melayani suami dengan sengaja, dan (v) istri dalam kondisi gila. Adapun pihak suami akan dilihat dari aspek berikut: (i) mampu secara ekonomi untuk mencukupi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya, (ii) berusaha untuk berbuat adil, (iii) poligami yang dilakukan tidak menimbulkan madlarat/bahaya terhadap istri sebelumnya dari sisi agama, jiwa, badan, dan harta, serta (iv) poligami tersebut tidak menurunkan martabat istri dan keluarganya. Seorang suami yang melakukan perkawinan poligami dengan tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan, maka ia akan terkena sanksi berupa denda atau penjara atau keduanya sekaligus.¹⁴

Brunei Darussalam, dalam UU perkawinannya tidak mencantumkan persoalan poligami. Jika terjadi praktek poligami hanya terdapat anjuran untuk tidak dilakukan secara sembarangan, namun harus dengan penuh pertimbangan. Namun, karena bukan merupakan Undang-undang, maka hakim atau pengadilan tidak dapat melarang poligami, dan tugas pengadilan sebatas anjuran agar suami tidak menelantarkan istri dan anak-anaknya.¹⁵

Secara normatif, Singapura juga tidak memiliki aturan khusus tentang poligami. Hanya saja, dalam praktik perkawinannya, semua syarat harus terpenuhi dimana salah satunya menetapkan bahwa seorang laki-laki yang telah mempunyai istri tidak boleh melangsungkan perkawinan, kecuali mendapat izin dari hakim. Dan pada prakteknya hakim tidak akan memberikan izin untuk perkawinan poligami.¹⁶

Yordania tidak memiliki aturan yang secara tegas mengatur tentang poligami. Namun demikian, secara tersirat terdapat ketentuan dalam pasal 17 Undang-undang perkawinan Yordania yang menyatakan bahwa suami yang ini menyiratkan kebolehan akan poligami bagi seorang suami. Secara teknis, poligami dimaksud tetap melibatkan peran pengadilan agama (*maḥkamah shari'ah*), dimana seorang istri diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pembatalan terhadap pernikahan poligami suaminya. Jauh sebelumnya, seorang istri dalam akad nikah juga diperbolehkan mengajukan semacam syarat tertentu/*ta'liq talaq*, yang di dalamnya juga boleh memuat mengenai poligami. Dengan demikian, seorang istri dapat menjadikan alasan poligami sebagai tuntutan perceraian, jika dalam akad nikahnya tercantum syarat yang demikian.¹⁷

¹⁴ Khoiruddin Nasution, *Op. Cit.*, hlm., 276-282.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 284-285

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 285-286

¹⁷ Nurul Ma'rifah, *Pembaruan Hukum Keluarga Islam Yordania*, dalam Khoiruddin Nasution, dkk., *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta: Academia, 2012), hlm. 73-75.

Turki telah memiliki aturan tentang poligami sebagaimana tertuang dalam *The Turkish Family Law of Cyprus* pasal 8-9, di dalamnya terdapat larangan melakukan perkawinan poligami selama pernikahan pertama masih berlangsung. Seorang suami tidak boleh melangsungkan perkawinan yang kedua, selama dia tidak mampu menunjukkan terputusnya ikatan pernikahan baik karena kematian, perceraian, atau pernyataan pembatalan. Dengan demikian, jika seorang suami melakukan pernikahan yang kedua padahal pernikahan pertama masih berlangsung, maka pernikahan keduanya dapat dibatalkan oleh pengadilan. Demikian pula, seorang istri boleh meminta *ta'liq talaq* dengan mencantumkan poligami sebagai alasan perceraian.¹⁸

Mirip dengan Turki, Tunisia juga memiliki aturan tentang poligami yang menitikberatkan pada larangan poligami. Bahkan secara tegas, larangan poligami dicantumkan dengan disertai sanksi. Dalam *The Code of The Personal Status Tunisia* tahun 1958, dinyatakan bahwa: "*Poligami dilarang. Bagi siapa saja baik bagi yang sudah menikah dan perkawinannya belum tuntas (cerai) kemudian mereka menikah lagi, maka ia akan dipenjara selama satu tahun atau denda*

240.000 maims". Tegasnya, aturan Tunisia yang melarang poligami dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa syarat mutlak dalam poligami adalah kemampuan untuk berbuat adil. Sementara sikap adil adalah sesuatu yang tidak mungkin dicapai oleh manusia. Di sisi lain, para ahli hukum Tunisia berpandangan bahwa poligami –sebagaimana perbudakan– adalah 'institusi antara' yang boleh ada hanya pada fase perkembangan, dan tidak boleh ada lagi pada masyarakat yang telah berbudaya.¹⁹

Adapun Negara Syria dalam hal poligami memiliki aturan yang membolehkan poligami, hanya saja, kebolehan ini juga dilengkapi dengan syarat sang suami memiliki sumber nafkah yang cukup dan mampu berlaku adil. Untuk itu, poligami yang dilakukan harus melewati pengadilan agama yang akan menilai dan menimbang apakah seseorang itu mampu dan layak melakukan poligami. Dalam hal ini, Undang-undang Syria tahun 1975 Pasal 17 menyatakan bahwa: "*hakim mempunyai wewenang penuh untuk tidak mengizinkan seorang Suamiberistri lebih dari seorang jika terbukti tidak mampu berbuat adil dan tidak mampu menafkahnya*".²⁰

Negara Iraq menetapkan aturan tentang poligami dalam *The Iraki Law of Personal Status* (ILPS) tahun 1959 pada pasal 3 ayat 4,5 dan 6. Ayat 4 menegaskan bahwa Poligami tidaklah diperbolehkan kecuali setelah mendapat izin dari pengadilan. Untuk

¹⁸ Umar Faruq Thohir, Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki, dalam *Ibid.*, hlm. 106-108.

¹⁹ Siti Munadzirah, Pembaruan Hukum Keluarga di Tunisia, dalam *Ibid.*, hlm. 54-57.

²⁰ Masnun Tahir, Kebijakan Negara Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Banding Atas Hukum Keluarga Syria dan Tunisia), dalam *Ibid.*, hlm. 146.

mendapatkan izin poligami ini, pengadilan akan melihat tiga hal: kemampuan finansial, ada tidaknya kemaslahatan dalam poligami tersebut, dan kemampuan berbuat adil dari pelaku poligami. Jika syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pengadilan tidak akan menerbitkan izin poligami. Penilaian akan kelayakan poligami berdasarkan syarat di atas, diserahkan kepada hakim (*qadli*). Namun, Pada perkembangannya, muncul amandemen terhadap aturan poligami dengan ketentuan terbaru bahwa poligami dilarang, kecuali jika yang dipoligami adalah janda.²¹

Di Mesir, poligami termaktub dalam UU No. 100 tahun 1985. Secara prinsip poligami adalah boleh. Namun, UU No.100 tahun 1985 ini memberikan ketentuan bahwa suami yang poligami dapat dijadikan alasan perceraian yang diajukan pihak istri. Ini karena poligami dinilai dapat menimbulkan kesusahan dari sisi ekonomi. Di samping itu, pihak pengadilan harus pula memberitahukan rencana poligami seorang suami kepada istri atau istri-istrinya. Bila tidak, hal itu dapat dimasukkan sebagai tindakan pelanggaran hukum yang dapat dihukum dengan penjara maupun denda.²²

Maroko juga membolehkan adanya poligami. Dalam UU Tahun 1958 disebutkan bahwa seorang istri berhak memasukkan persoalan poligami dalam *ta'liq talaq*-nya. Artinya, UU memberikan ruang kepada para istri untuk meminta cerai jika suami melakukan poligami. Di sisi lain, meski tidak masuk dalam *ta'liq talaq*, pihak hakim atau pengadilan dapat pula memberikan pertimbangan apakah poligami yang akan dilakukan membawa manfaat atau justru sebaliknya. Hasil pertimbangan ini dapat menjadi penentu apakah poligami boleh dilaksanakan atau justru dilarang. Tambahan pula, seorang istri juga harus diberi tahu terlebih dahulu mengenai adanya rencana poligami. Libya membolehkan poligami, dengan ketentuan praktek tersebut telah mendapat izin dari pengadilan. Izin pengadilan diberikan dengan mempertimbangkan tiga hal pokok, yaitu kondisi sosial, kemampuan ekonomi, dan kondisi atau kemampuan fisik si suami.²³

Adapun Al Jazair juga memiliki UU perkawinan yang membolehkan adanya perkawinan poligami. Batas istri yang diperbolehkan adalah 4 orang. Namun demikian, praktek poligami yang dilakukan seorang suami dapat dijadikan alasan seorang istri untuk mengajukan perceraian, jika poligami tersebut tanpa sepengetahuan si istri.⁴³ Somalia juga menerapkan aturan yang membolehkan poligami secara bersyarat. Bagi mereka yang akan berpoligami harus mendapat izin dari pengadilan. Sedangkan alasan atau kriteria yang dapat membolehkan poligami adalah: istri mandul dengan bukti surat keterangan dokter, istri dipenjara lebih dari dua tahun, istri meninggalkan rumah

²¹ Juandi, Hukum Keluarga Muslim di Irak, dalam *Ibid.*, hlm. 13

²² Khoiruddin Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 288-289

²³ *Ibid.*,

tanpa izin lebih dari satu tahun, dan arena ada faktor kebutuhan social.²⁴

Bangladesh dan Pakistan juga memiliki aturan undang-undang yang membolehkan poligami. Namun demikian, sebagaimana sebagaimana negara muslim lainnya, poligami yang dilakukan harus seizin pengadilan. Pelanggaran akan ketentuan ini dapat dijatuhi hukuman penjara dan juga denda.²⁵

D. TUJUAN ATURAN POLIGAMI

¹ Dapat dikatakan bahwa adanya pembaharuan hukum Islam termasuk hukum perkawinan dimana poligami merupakan salah satu bagiannya, adalah sebuah keniscayaan.²⁶ Wujud pembaharuan dimaksud salah satunya adalah adanya proses perubahan dan penguatan fikih dari yang semula bersifat volunter menjadi aturan baku berupa Undang-undang. Tujuannya, paling tidak ada tiga hal, yaitu:²⁷

- a. Memberikan kepastian hukum khususnya berkenaan dengan masalah perkawinan, sebab sebelum adanya Undang-undang, aturan perkawinan bersifat *judge made law*.
- b. Melindungi hak-hak kaum wanita dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita.
- c. Menciptakan undang-undang yang sesuai dan relevan dengan konteks perkembangan zaman.

Tiga tujuan dari adanya pembaharuan dalam konteks hukum perkawinan di atas, kiranya juga merupakan tujuan adanya aturan tentang poligami. Memberikan kepastian hukum berarti bahwa dengan pola aturan poligami yang diatur oleh Undang-undang, para suami yang hendak poligami tidak boleh dan tidak dapat berbuat semaunya. Mereka harus tunduk dan patuh dengan ketentuan yang berlaku. Di dalam ketentuan-ketentuan ini, dimunculkan syarat-syarat yang menjamin keberlangsungan perkawinan, baik dengan istri yang sebelumnya maupun dengan istri yang baru termasuk dengan anak-anaknya. Mayoritas Negara yang membolehkan poligami mensyaratkan adanya izin dari pihak pengadilan untuk perkawinan poligami. Dalam proses perizinan inilah, Negara dapat melakukan intervensi dalam arti menetapkan syarat dan menimbang kelayakan orang yang hendak poligami. Dengan demikian, akan lebih tercipta kepastian hukum dalam konteks poligami.

²⁴ Ibid.,

²⁵ Ibid.,

²⁶ Ibid.,

²⁷ Ibid.,

Selanjutnya, aturan poligami juga merupakan wujud penghargaan hak-hak wanita, dimana yang demikian merupakan wujud keinginan kaum wanita untuk juga dihormati dan dihargai harkat dan martabatnya. Syarat kemampuan ekonomi dan fisik bagi pelaku poligami yang diterapkan di banyak Negara muslim merupakan bagian dari cerminan tujuan ini. Dengan kemampuan yang cukup baik fisik maupun finansial, seorang suami yang berpoligami diharapkan mampu tetap mensejahterakan istri-istri dan anak-anaknya. Kemampuan ini penting, sebab jika ia tidak memiliki kemampuan yang cukup, tujuan rumah tangga yang hendak dituju tidak akan tercapai, dan sangat mungkin keluarga yang ada rentan akan berbagai persoalan.

Dalam batasan tujuan yang kedua pula, terlihat adanya aturan poligami yang menyaratkan adanya izin dari pihak istri. Ini dalam rangka menghargai hak seorang perempuan yang telah menjadi istri untuk dapat hidup berdampingan dengan suaminya secara utuh. Izin istri menjadi penting, karena dengan itu terlihat betapa suami telah berbuat maksimal untuk mendapatkan izin dimaksud.

Di samping itu, adanya syarat dapat berbuat adil juga dapat dinilai dalam rangka mewujudkan penghargaan kepada kaum wanita. Artinya, poligami yang dilakukan oleh seorang suami tidak boleh menjadi pintu masuk adanya kezaliman khususnya bagi istri sebelumnya. Di sinilah peran penting pengadilan untuk dapat menilai dan mempertimbangkan apakah seorang dapat berlaku adil jika melakukan perkawinan poligami. Jika tidak mampu berbuat adil, maka poligami ini justru dapat menjadi alasan pengajuan perceraian dari pihak istri, baik hal itu dituangkan dalam *ta'liq talaq* maupun tidak.

Selanjutnya, aturan poligami juga dapat dinilai dalam rangka menyesuaikan dengan konteks perkembangan zaman. Artinya, kondisi kekinian dalam sebuah Negara dapat pula menjadi pertimbangan dalam melahirkan aturan tentang poligami.²⁸ Hal ini terlihat dari adanya syarat- syarat poligami yang relatif lebih sulit dan kompleks jika dibandingkan dengan aturan dalam fikih klasik. Pemicunya antara lain perkembangan zaman yang secara sosiologis ditandai dengan meningkatnya peran serta kaum wanita dalam hampir semua lini kehidupan, sehingga membawa mereka kepada posisi dan peran yang hampir sama dengan kaum pria. Konsekwensinya, tuntutan persamaan hak dan kewajiban semakin mengemuka termasuk dalam ranah perkawinan dan khususnya poligami. Tunisia dan Turki adalah contoh dua Negara yang secara legal telah melakukan pelarangan terhadap praktek poligami dengan dasar pertimbangan bahwa poligami tidak lagi relevan untuk masyarakat

²⁸ Dalam batasan ini, misalnya sebuah Negara dapat pula menetapkan 'perubahan' aturan poligami dengan mempertimbangkan kondisi nasional sebuah Negara. Tentu hal ini idealnya telah dirumuskan secara matang oleh lembaga Negara yang berwenang. Lihat, Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 232-233

¹ modern yang telah berbudaya tinggi, di samping data faktual yang menunjukkan pelaku poligami hampir semuanya tidak mampu mewujudkan sikap yang adil dalam praktek perkawinan poligaminya.

IV. SIMPULAN

Paparan mengenai historisitas aturan poligami sebagaimana yang telah diuraikan dalam makalah ini, kiranya dapat diambil beberapa kesimpulan berikut ini. *Pertama*, poligami merupakan bagian dari kajian dalam hukum perkawinan, dan secara tekstual memang terdapat landasan hukum baik dari al-Qur'an maupun al-Sunnah. Landasan tekstual ini lantas dipahami oleh para ulama dan menghasilkan pemahaman berupa seperangkat aturan yang dikenal sebagai Fikih. Dalam fikih ini, poligami dihukumi boleh, dengan jumlah istri maksimal empat orang. Secara normatif, syarat untuk mampu berlaku adil juga diberlakukan dalam perkawinan poligami. *Kedua*, seiring perjalanan waktu dan dinamika kehidupan di dalamnya, muncul tuntutan dari kalangan wanita untuk membuat aturan tentang perkawinan termasuk poligami yang lebih memberi kepastian hukum dan jaminan perlindungan harkat dan martabat kaum wanita. Dari sini, maka lahir UU tentang perkawinan dimana tercakup di dalamnya masalah poligami. Dalam konteks Indonesia, UU Perkawinan secara tegas menyebutkan asas perkawinan sebagai monogami. Namun, perkawinan poligami masih diizinkan, dengan maksimal empat orang istri. Hanya saja, UU perkawinan telah menetapkan serangkaian aturan 'tambahan' dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan penghargaan terhadap martabat kaum wanita. Hal ini dilakukan dengan aturan poligami yang harus melalui institusi Negara, dimana di dalamnya diterapkan syarat kebolehan poligami yang cukup ketat. Hal yang sama juga diterapkan di beberapa negara muslim modern, seperti Yordania, Mesir, dan Malaysia. Bahkan, Tunisia dan Turki melangkah lebih berani dengan menetapkan larangan poligami. *Ketiga* tujuan adanya aturan poligami dalam bingkai Undang-undang adalah untuk memberikan kepastian hukum, memberikan penghargaan kepada Kaum wanita, dan dalam rangka mengkontekstualisasikan aturan hukum dengan kondisi kekinian, sehingga lebih relevan dan mampu mewujudkan kemaslahatan.

DAFTAR REFERENSI

- Abd. Salam Arif, Ijtihad, Perubahan Sosial dan Dinamika Hukum Islam, dalam Khoiruddin Nasution, dkk., *Antologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pascasarjana Press, 2013

Istishab: Journal of Islamic Law
Volume 03 Nomor 01 Juni 2022

- Abdul Wahab Khallaf, *'Ilm Usu' l> al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al 'Ilm, 1978
Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007
Abi Syuja', *At-Taqrib>* , Ttp: Tnp, tt.
- Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadiaannya*, Jakarta: Bulan Bintang,
1987
- As-Suyu>t{i, *Tanwi>r al H}a>walik, Syarh 'al Muwat}t}a' Malik*, Juz II, Ttp: Tnp, tt.
Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah,
Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Ibn Rusyd al-Qurt{ubi>, *Bida>yatul-Mujtahid wa Niha>yatul-Muqtas{id*, Juz II,
Ttp: Dar Ihya' al Kutub al-'Arabiyyah, tt
- Ibnu Hajar al-'Asqalani>, *Bulu>gh al Mara>m min Adillat al Ahkam*, Ttp: Tnp, tt. Izz
ad Din Ibn 'Abd as-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al Anam, Jzz I*,
Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999
- Juandi, *Hukum Keluarga Muslim di Irak*, dalam Khoiruddin Nasution, dkk., *Hukum
Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: Academia,
2012.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid VII*, Jakarta: Lentera Abadi,
2010
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan
Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA&Tazzafa,
2013
- M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam
Politik*, Jakarta: Gramedia, 1998
- Marzuki Wahid dan Nurrohman, *Dimensi Fundamentalisme dalam Politik
Formalisasi Syari'at Islam, Kasus NAD*, dalam Taswirul Afkar, Edisi No. 13
Tahun 2002
- Masnun Tahir, *Kebijakan Negara Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan
(Studi Banding Atas Hukum Keluarga Syria dan Tunisia)*, dalam Khoiruddin
Nasution, dkk., *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*,
Yogyakarta: Academia, 2012
- Muhammad Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ayat al Ahkam min Al-Qur'an, Juz I*, Ttp: Tnp, tt.
- Muhammad Ibn Ismail As}-S}an'ani, *Subul as-Sala>m*, Juz III, Surabaya: Al
Hidayah, tt.

Istishab: Journal of Islamic Law
Volume 03 Nomor 01 Juni 2022

Nurul Ma'rifah, Pembaruan Hukum Keluarga Islam Yordania, dalam Khoiruddin Nasution, dkk., *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: Academia, 2012.

Siti Munadzirah, Pembaruan Hukum Keluarga di Tunisia, dalam Khoiruddin Nasution, dkk., *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: Academia, 2012

ORIGINALITY REPORT

19%
SIMILARITY INDEX

9%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

14%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Student Paper **14%**

2 www.scilit.net
Internet Source **5%**

Exclude quotes On

Exclude matches < 200 words

Exclude bibliography On